

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar Negara atau perkebunan besar swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang dengan pesat. Perkebunan kelapa sawit yang semula hanya di Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh saat ini sudah berkembang di beberapa propinsi, antara lain: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Irian Jaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Permintaan minyak kelapa sawit di samping digunakan sebagai bahan mentah industri pangan juga digunakan sebagai bahan mentah industri nonpangan. Jika dilihat dari biaya produksinya. Komuditas kelapa sawit jauh lebih rendah daripada minyak nabati lainnya.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan produk sistem ekonomi kapitalis yang tidak dapat dilepaskan dari watak eksploitatif dan penindasan. Potensi dan kontribusi kelapa sawit untuk perekonomian nasional memang sangat tinggi, namun membawa dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang mengkhawatirkan. Keuntungan ekonomi dari produksi kelapa sawit tidak didistribusikan secara merata, mengeksploitasi buruh kebun dan menciptakan kemiskinan bagi masyarakat lokal akibat tanah yang dirampas. Hal tersebut di atas terurai dalam seminar 2 hari yang diselenggarakan oleh Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Serbundo) di Medan. Seminar berlangsung dari 8 – 9 November 2013 di Universitas Nommensen dengan tema “Hentikan Eksploitasi Buruh Perkebunan Dan Industri”. Menurut Ahmad Surambo, “Menurut data Kemendag, Produksi kelapa sawit meraup keuntungan Rp 205 Trilyun pada 2012, meningkat 160 trilyun dari 2011. Namun peningkatan keuntungan tersebut tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia yang mengalami penurunan sekitar 6,3%

pada 2012 (Data BPS 2012). “Keuntungan tersebut seakan menguap dan malah meninggalkan jejak kemiskinan pada hidup buruh, petani dan masyarakat adat. Kelapa sawit yang dinilai telah menyerap banyak tenaga kerja ternyata belum mampu mensejahterakan buruh, petani dan masyarakat adat, lanjut Deputy Direktur Sawit Watch tersebut.

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja disektor pertanian. Perkembangan jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin pada sub sektor perkebunan tahun 2007-2011, mengalami peningkatan sebesar 1,95%. Keterlibatan wanita dalam mencari nafkah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Peluang kerja bagi wanita sudah hampir sejajar dengan pria, sehingga sangat memungkinkan bagi wanita untuk berprestasi sama dengan pria bahkan lebih baik karena karakteristik wanita yang khas seperti pendidikan, keahlian, kreativitas, ketelitian, semangat kerja, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memperkuat posisi tawar bagi wanita bahwa para pekerja wanita perkebunan kelapa sawit mampu menopang kehidupan keluarga, dengan pendapatan yang diperolehnya diharapkan keluarga pekerja perkebunan kelapa sawit menjadi sejahtera (Anonim, 2013).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Pengukuran TPAK diperlukan mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka perediaan tenaga kerja. Secara umum TPAK perempuan menunjukkan tendensi yang meningkat dari tahun ketahun, yaitu dari 36,8 % pada tahun 1980 menjadi 44,2% pada tahun 1990, menjadi 46,9% pada tahun 1995, pada tahun 2000 menjadi 51,6 %. Pada tahun 2004 menunjukkan bahwa TPAK perempuan adalah 49,2%. Memang karena sumber datayang digunakan berbeda, tetapi paling tidak angka-angka yang disajikan menunjukkan indikasi eksistensi perempuan yang cukup signifikan didunia kerja.

Kondisi TPAK perempuan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain “*Value of market time*”, yaitu karena pendidikan meningkat, permintaan tenaga kerja perempuan meningkat, dan produktivitas secara keseluruhan meningkat. Selain itu, dipengaruhi oleh “*value non-market time*” yang berkaitan dengan tersedianya barang-barang substitusi, urbanisasi/migrasi, trend demografi, pendapatan suami, selera/aspirasi untuk memaksimalkan kesejahteraan keluarga, pergeseran struktur budaya.

Tabel 1.1. Tenaga Kerja Perempuan Menurut Sektor Ekonomi, 1980-2004
(dalam persen)

Sektor	1980	1985	1990	1995	2000	2004
Pertanian	57,8	53,6	48,1	43,8	46,7	44,6
Industri	9	12,2	12,2	16	15	14,2
Jasa	33,2	34,2	34,2	40,2	38,3	41,2
TOTAL	100	100	100	100	100	100
Absolut	16.159.683	21.705.127	24.645.611	27.715.937	34.398.667	33.140.525

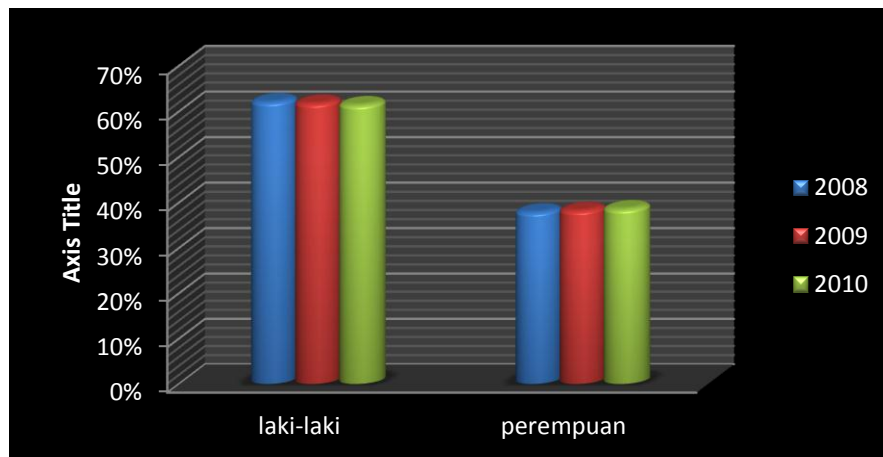
Sumber : BPS 2005

Keterbatasan data statistik menyebabkan kesulitan untuk mengetahui secara tepat besarnya kontribusi tenaga kerja perempuan terutama pada subsektor pertanian dan perkebunan. Keadaan ini menyebabkan adanya “*under-estimated*” dari partisipasi tenaga kerja perempuan, yang antara lain disebabkan banyaknya tenaga kerja perempuan bekerja diluar sektor formal, dan atau sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar. Meskipun demikian, indikasi kontribusi tenaga kerja perempuan dalam pembangunan dapat ditunjukkan melalui besarnya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan distribusinya disektor-sektor ekonomi (Irianto, 2006).

Sesuai data Sakernas, jumlah penduduk yang bekerja selama tiga tahun (2008-2010) cenderung terus meningkat yakni dari 102,01 juta orang pada tahun 2008 menjadi 104,49 juta orang pada tahun 2009 dan 107,41 juta orang pada tahun 2010. Jika dilihat menurut jenis kelamin dalam kurun waktu yang sama, komposisi penduduk yang bekerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang masing-masing pada tahun

2008 sebesar 62,1 % dan 37,9 %, pada tahun 2009 sebesar 61,77 % dan 38,23 %, dan pada tahun 2010 sebesar 61,42 % dan 38,58 %.

Gambar 1.1. Grafik Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin 2008-2010 (%).



Sumber: Sakernas, BPS.

Namun demikian, dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa persentase perempuan yang bekerja terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan bekerja untuk perempuan terus meningkat, sehingga laki-laki dan perempuan semakin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan.

Selain itu, semakin banyak pula perempuan yang bukan angkatan kerja (sekolah dan rumah tangga) masuk ke dalam kelompok angkatan kerja untuk bekerja. Melihat kecenderungan yang seperti ini, diprediksikan jumlah persentase perempuan yang bekerja akan mengalami peningkatan pada masa-masa mendatang (Iskandar,2012).

Perempuan diposisikan pada pekerjaan yang dianggap mudah, tidak perlu keterampilan sehingga boleh diupah rendah, serta ada pandangan penghasilan perempuan sebagai penghasilan tambahan dalam keluarga. Ketidakadilan gender berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga tercermin dari adanya diskriminasi dalam hal jaminan sosial. Buruh perempuan tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan dana pensiun bagi anak-anaknya sedangkan untuk buruh laki-laki akan mendapatkan fasilitas

kesehatan untuk dirinya dan juga berlaku bagian anggota keluarganya yaitu seorang istri dan 2 anak. Kesehatan anak-anak dianggap menjadi tanggung-jawab laki-laki. Begitu pula soal tabungan untuk masa depan anak-anak (Ari,2011). Nasib buruh perempuan yang berstatus harian lebih memprihatinkan lagi. Mereka sama sekali tidak mendapat fasilitas kesehatan, dana pension dan hak cuti haid serta melahirkan. Tekanan ekonomi akibat rendahnya pendapatan sering membuat perempuan tetap bekerja dan tidak menggunakan hak cuti haid. Mereka juga harus berutang kepada tengkulak maupun koperasi perkebunan. Pada hari libur, di samping mengerjakan kewajiban di rumah-tangga, perempuan memilih tetap bekerja di perkebunan milik perorangan yang membuat akses sosial dan politik buruh perempuan terpinggirkan. Mereka tidak mempunyai kesempatan berinteraksi dengan masyarakatnya. Jadi, buruh perkebunan identik dengan keterpaksaan, ketiadaan lahan, pendapatan rendah, minimnya pendidikan, dan banyak hutang (Rahmawati,2011). Permasalahan kedepan adalah apakah sektor perkebunan kelapa sawit tetap menjadi tumpuan bagi tenaga kerja Indonesia.

Semenjak masuknya perkebunan sawit diprovinsi jambi pada tahun 1984 sampai dengan sekarang perempuan tidak pernah lepas dari lingkaran produksi di dalam perkebunan sawit tersebut, kemiskinan dan kekerasan juga menjadi warna dalam kehidupan perempuan sepanjang sejarah perkebunan sawit itu berdiri, perempuan dalam posisi ini juga telah kehilangan terhadap tanah garapan dan lebih buruk lagi perempuan ditempatkan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) diperkebunan besar kelapa sawit tanpa adanya jaminan kehidupan dan kesehatan sebagai tenaga kerja murah yang dipekerjakan untuk merawat, memungut brondol dan menyemprot perkebunan sawit dengan menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Walaupun partisipasi produksi perempuan sangat tinggi dalam lingkaran produksi perkebunan besar kelapa sawit ini, namun kenyataannya

perempuan tetap saja memperoleh kepahitan dalam rantai produksi tersebut diantaranya adalah :

1. Meningkatnya beban ganda dalam rumah tangga
2. Adanya perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan
3. Tidak adanya jaminan hidup yang jelas serta tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
4. Hilangnya sistem sosial dan budaya

Kepahitan-kepahitan yang dialami oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh sebenarnya sudah mereka sadari, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kelangsungan hidup bagi keluarga mereka. Perkebunan besar kelapa sawit yang telah memonopoli tanah dan merampas lahan produktif telah merubah pola kehidupan perempuan dan masyarakat sekitarnya menjadi masyarakat yang konsumtif terhadap kebutuhan hidupnya dan terlebih lagi bagi perempuan yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Buruh Harian Lepas (BHL) di perkebunan besar kelapa sawit khususnya perempuan mempunyai potensi tinggi terhadap keracunan akibat dampak pestisida yang digunakan perkebunan besar kelapa sawit, ini semua disebabkan oleh banyaknya pekerjaan berbahaya yang dikerjakan oleh perempuan seperti penyemprotan pestisida, pemupukan dan penyerbukan tanpa ada perlengkapan atau alat pelindung dalam bekerja masih ditemukan didalam rantai produksi perkebunan besar kelapa sawit. Minimnya informasi dan perlengkapan kerja yang memadai guna melindungi diri bagi para pekerja tersebut jelas dapat merugikan diri mereka sendiri, dengan upah Rp.32.750,-/Hk/Hari tidaklah setimpal dengan resiko keracunan yang akan mereka hadapi (Ferdiansyah,2010).

Oleh karena itulah, penelitian mengenai peran dan status kerja dalam kegiatan produksi perkebunan kelapa sawit ini menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk dikaji dan dibuktikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah pokok yang dikemukakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status tenaga kerja wanita di perkebunan kelapa sawit?
2. Peran apa saja yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja wanita yang di perkebunan kelapa sawit?
3. Bagaimana produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja wanita diperkebunan kelapa sawit?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita dalam kegiatan produksi di perkebunan kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan seperti yang telah dikemukakan diatas yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis status tenaga kerja wanita di perkebunan.
2. Mengetahui peran apa saja yang dilakukan tenaga kerja wanita diperkebunan kelapa sawit.
3. Mengetahui bagaimana produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja wanita diperkebunan kelapa sawit?
4. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi produktivitas wanita dalam kegiatan produksi di perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat khususnya bagi:

1. Peneliti, merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori yang telah diperoleh.

2. Kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi untuk penulisan atau penelitian selanjutnya mengenai kondisi kerja tenaga kerja wanita perkebunan.
3. Instansi terkait, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pendorong agar memperhatikan tenaga kerja wanita perkebunan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan terkait dengan ketenagakerjaan.